

ABSTRAK

Responsivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam pembangunan infrastruktur jembatan di Kecamatan Secanggang, Fokus penelitian ini adalah pada berbagai sikap dan tindakan aparat birokrasi untuk memprioritaskan kebutuhan publik. Serta Hambatan Pembangunan infrastruktur jembatan di kecamatan secanggang kabupaten langkat yang tidak terlaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui responsivitas pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jembatan dikecamatan secanggang kabupaten langkat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pembangunan tersebut. Masyarakat Kecamatan Secanggang hingga saat ini masih mengandalkan *getek* sebagai sarana penyeberangan antara Kecamatan Secanggang dan Tanjung Pura, yang dianggap memerlukan biaya dan waktu hal ini tentunya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, adapun lokasi penelitian ini dilakukan dikecamatan secanggang kabupaten langkat. Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan teori responsivitas yang dikemukakan oleh Dwiyanto yang digunakan dalam penelitian ini. Teori responsivitas mencakup hal dari Sikap dan Tindakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam merespon keluhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah dalam pembangunan jembatan di Kecamatan Secanggang belum maksimal, meskipun sudah ada upaya untuk menyediakan saluran aspirasi melalui *portal website*. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur ini. Selain itu, masalah teknis seperti kepemilikan tanah, kondisi geografis, serta pengaruh pasang surut air menjadi hambatan besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperbesar alokasi anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan Publik, Infrastruktur Jembatan.

ABSTRACT

Responsiveness of the Langkat Regency Government in the construction of bridge infrastructure in Secanggang District, The focus of this study is on various attitudes and actions of bureaucratic apparatus to prioritize public needs. As well as Obstacles to the construction of bridge infrastructure in Secanggang District, Langkat Regency that have not been implemented. The purpose of this study is to determine the responsiveness of the local government in the construction of bridge infrastructure in Secanggang District, Langkat Regency and to identify factors that hinder the implementation of this construction. The Secanggang District community until now still relies on getek as a means of crossing between Secanggang District and Tanjung Pura, which is considered to require costs and time, this is certainly ineffective and inefficient. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation, while the location of this research was conducted in Secanggang District, Langkat Regency. The data analysis technique for this study is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used is the responsiveness theory proposed by Dwiyanto which is used in this study. The theory of responsiveness includes aspects of the Attitude and Actions given by the local government in responding to public complaints. The results of the study indicate that the responsiveness of the local government in the construction of bridges in Secanggang District has not been maximized, although there have been efforts to provide aspiration channels through the website portal. Budget limitations are the main obstacle in the development of this infrastructure. In addition, technical problems such as land ownership, geographical conditions, and the influence of tidal water are major obstacles in the planning and implementation of bridge construction. This study suggests that the local government improve coordination between agencies and increase budget allocations to accelerate the development of infrastructure that is greatly needed by the community.

Keywords: *Responsiveness, Public Service, Bridge Infrastructure*